



Framing Berita Penahanan Hasto Kristiyanto oleh KPK dalam Detik.com dan Tempo.co

Allauddin Rafif Irsa¹, Catur Suratnoaji²

^{1,2}Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur, Indonesia

E-mail: 21043010282@student.upnjatim.ac.id, catur_suratnoaji.ilkom@upnjatim.ac.id

Article Info	Abstract
Article History Received: 2025-06-10 Revised: 2025-07-20 Published: 2025-08-03 Keywords: Framing; Online Media; Hasto Kristiyanto; KPK; Robert N. Entman; Detik.com; Tempo.co.	This study aims to analyze how online media Detik.com and Tempo.co present news related to the arrest of the Secretary General of the Indonesian Democratic Party of Struggle (PDIP), Hasto Kristiyanto, by the Corruption Eradication Commission (KPK) in February 2025. This study uses Robert N. Entman's framing theory which includes four main elements, namely problem definition, cause interpretation, moral evaluation, and resolution recommendations. The results show that the two media have different tendencies in framing the event. Detik.com emphasized the legal aspects and the investigation process, while Tempo.co highlighted the alleged politicization and internal party dynamics. This difference reflects different perspectives and interests in shaping public perceptions of the event.
Artikel Info	Abstrak
Sejarah Artikel Diterima: 2025-06-10 Direvisi: 2025-07-20 Dipublikasi: 2025-08-03 Kata kunci: Framing; Media Daring; Hasto Kristiyanto; KPK; Robert N. Entman; Detik.com; Tempo.co.	Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana media daring Detik.com dan Tempo.co membingkai pemberitaan terkait penahanan Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto, oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Februari 2025. Pendekatan yang digunakan adalah analisis <i>framing</i> model Robert N. Entman, yang terdiri dari empat elemen utama: pendefinisian masalah, identifikasi penyebab, penilaian moral, dan rekomendasi penyelesaian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kedua media memiliki kecenderungan yang berbeda dalam membangun narasi pemberitaan. Detik.com lebih menitikberatkan pada aspek hukum dan teknis penyidikan, sedangkan Tempo.co menyoroti isu politisasi serta dinamika internal partai. Perbedaan ini mencerminkan adanya perbedaan perspektif dan kepentingan dalam membentuk realitas di ruang publik.

I. PENDAHULUAN

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji bagaimana dua media daring, Detik.com dan Tempo.co, membentuk konstruksi pemberitaan terkait penahanan Hasto Kristiyanto oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Februari 2025. Analisis terhadap strategi *framing* dalam berita menjadi penting untuk memahami bagaimana media merepresentasikan suatu peristiwa dan bagaimana hal tersebut memengaruhi persepsi masyarakat. Untuk itu, penelitian ini menggunakan pendekatan analisis *framing*. Menurut Muhaemin dan Sanusi (dalam Dendi Alrizki & Cutra Aslinda, 2022), analisis *framing* merupakan metode untuk menelusuri bagaimana media membentuk makna melalui pemilihan, penekanan, dan penyampaian unsur-unsur tertentu dalam pemberitaan. Pendekatan ini memungkinkan peneliti mengungkap strategi komunikasi media dalam menyampaikan pesan, termasuk pilihan bahasa, sudut pandang, dan aspek yang ditonjolkan. Penelitian ini menggunakan model *framing* yang dikembangkan oleh Robert N. Entman sebagai kerangka analisis utama, yang terdiri dari empat elemen kunci

mendefinisikan masalah (*define problems*), mengidentifikasi penyebab (*diagnose causes*), memberikan penilaian moral (*make moral judgment*), serta mengajukan solusi atau rekomendasi (*treatment recommendation*), sebagaimana dijelaskan oleh Entman dalam Eriyanto. Model analisis *framing* yang dikembangkan oleh Robert N. Entman, sebagaimana dijelaskan dalam Eriyanto (2002: 221), menjadi pendekatan utama dalam penelitian ini karena dapat menguraikan bagaimana media menetapkan suatu persoalan. Penelitian ini berupaya menggambarkan bagaimana media daring, khususnya Detik.com dan Tempo.co, membentuk narasi pemberitaan mengenai penahanan Hasto Kristiyanto oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Februari 2025. Dengan menggunakan analisis *framing* dari Robert N. Entman, penelitian ini mengidentifikasi bagaimana media merumuskan persoalan, menentukan pihak yang dianggap bertanggung jawab, menyampaikan penilaian moral, serta menyarankan solusi. Tujuannya adalah untuk mengungkap sejauh mana media berkontribusi dalam membentuk realitas publik serta apakah

terdapat kecenderungan atau keberpihakan tertentu yang memengaruhi cara informasi disampaikan.

Penahanan terhadap Hasto Kristiyanto Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan menjadi perhatian utama dalam diskursus politik nasional awal 2025. Penetapan tersangka terhadap Hasto dikaitkan dengan dugaan keterlibatannya dalam kasus suap terkait mekanisme pergantian antar waktu (PAW) anggota DPR, serta peranannya dalam menghalangi upaya penangkapan Harun Masiku, buronan yang sebelumnya menjadi sorotan sejak tahun 2020. Setelah melalui pemeriksaan intensif, KPK secara resmi menahan Hasto, yang memicu perdebatan luas di ranah publik dan media.

Penahanan ini tidak lepas dari kontroversi. Sebagian kalangan menilai langkah KPK sarat kepentingan politik, apalagi melihat posisi Hasto sebagai figur kunci dalam partai oposisi menjelang Pemilu 2029. Dugaan adanya muatan politis diperkuat oleh pertanyaan mengapa kasus yang telah mencuat sejak 2019 baru diproses lebih lanjut setelah konfigurasi politik nasional mengalami perubahan pasca Pemilu 2024. Kritik juga muncul karena kasus serupa yang melibatkan elite dari partai lain tidak mendapat perlakuan yang setara. Kondisi ini menimbulkan asumsi tentang ketimpangan dalam penerapan hukum dan selektivitas institusi antikorupsi.

Di tengah dinamika tersebut, media menjadi aktor penting dalam membentuk persepsi publik. Pemberitaan bukan hanya menyampaikan fakta, tetapi juga menyusun realitas melalui bahasa, sudut pandang, dan fokus tertentu. Bungin dalam Dedi Kusuma Habibie (2018) menyatakan bahwa media berperan sebagai saluran utama penyebaran informasi kepada masyarakat, baik melalui media cetak, siaran, maupun platform digital. Namun, realitasnya, banyak media menjalankan fungsi ini dengan pendekatan yang dipengaruhi oleh orientasi ekonomi-politik perusahaan media tempat mereka bernaung.

Sejalan dengan itu, Alamsyah (2021) menyebutkan bahwa kecepatan penyebaran informasi oleh media tidak selalu diiringi dengan objektivitas, sebab isi berita dapat mencerminkan preferensi atau afiliasi institusi yang menaunginya. Hal ini didukung oleh pandangan Sobur dalam Anung Pratiwi Meilina (2022), yang menjelaskan bahwa opini publik sangat mungkin terbentuk berdasarkan narasi yang dominan dalam pemberitaan, terutama ketika media menekankan atau mengecilkan aspek tertentu dari suatu peristiwa.

Untuk itu, penting bagi masyarakat untuk memahami bahwa isi media bukanlah cerminan realitas objektif semata, melainkan hasil dari proses konstruksi sosial yang kompleks. Melalui kerangka inilah penelitian ini dilakukan: untuk menelaah secara kritis bagaimana dua media besar di Indonesia Detik.com dan Tempo.co membangun narasi terhadap kasus penahanan Hasto Kristiyanto dan bagaimana narasi tersebut memengaruhi pemaknaan publik terhadap peristiwa yang terjadi. Dengan cara ini, penelitian ini tidak hanya memetakan perbedaan gaya pemberitaan, tetapi juga mengungkap bagaimana media dapat berperan dalam memperkuat atau mempertanyakan dominasi narasi tertentu dalam ruang publik.

Agar dapat menganalisis hubungan antara media dan persepsi publik secara lebih mendalam, digunakan teori konstruksi sosial dari Peter L. Berger dan Thomas Luckmann sebagai landasan konseptual. Teori ini menyatakan bahwa realitas tidak terbentuk secara alamiah, melainkan melalui proses interaksi sosial dan komunikasi antarindividu. Dalam konteks ini, media berperan sebagai institusi sosial yang memiliki pengaruh besar dalam membentuk realitas sosial melalui cara mereka merepresentasikan suatu peristiwa dalam pemberitaan. Oleh karena itu, penting untuk mengkaji secara kritis struktur narasi dan pemilihan narasumber yang digunakan media dalam membentuk pemahaman publik terhadap suatu isu. Dalam karyanya *The Social Construction of Reality*, Berger dan Luckmann mengemukakan bahwa realitas sosial dibentuk melalui interaksi antarindividu dan pengalaman subjektif, yang kemudian menjadi objektif lewat lembaga-lembaga sosial seperti media massa. Bungin (2008) menambahkan bahwa masyarakat mengandung dua dimensi, yakni sisi subjektif dan objektif, yang menjadikan media sebagai aktor penting dalam proses pembentukan pemahaman terhadap suatu realitas. Namun, dalam kenyataannya, media tidak selalu berfungsi secara ideal sebagai institusi yang netral dan bebas dari pengaruh. Wibawa Darajat (2020) mengungkap bahwa media di Indonesia kerap terpengaruh oleh kepentingan politik maupun ekonomi, yang membuat independensinya sering kali dipertanyakan.

Kemajuan teknologi informasi dan lahirnya media digital telah memperluas jangkauan dan peran media dalam membentuk opini publik. Media daring kini menjadi sarana utama bagi masyarakat untuk mengakses informasi secara instan. Menurut laporan dari Asosiasi

Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII), hingga tahun 2024 terdapat sekitar 221,56 juta pengguna internet di Indonesia atau sekitar 79,5% dari jumlah penduduk. Tingginya angka ini menandakan betapa pentingnya peran media digital dalam membentuk persepsi publik terhadap isu-isu politik dan sosial yang berkembang.

Dalam konteks ini, dua media daring ternama di Indonesia Detik.com dan Tempo.co memiliki pendekatan pemberitaan yang berbeda. Detik.com, yang dikenal dengan gaya breaking news sejak awal kemunculannya pada 1998, mengedepankan kecepatan dalam penyajian informasi serta fokus pada fakta-fakta lapangan. Sementara itu, Tempo.co dikenal melalui pendekatan jurnalisme investigatif yang lebih kritis, terutama dalam mengangkat isu-isu yang berkaitan dengan politik dan kekuasaan.

Perbedaan pendekatan tersebut tampak nyata dalam pemberitaan mengenai penahanan Hasto Kristiyanto oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Detik.com lebih menyoroti proses hukum dan pendapat dari narasumber resmi seperti juru bicara KPK atau aparat penegak hukum. Sebaliknya, Tempo.co memberi ruang lebih besar kepada suara-suara dari tokoh politik, kuasa hukum, serta pengamat yang mempertanyakan motif di balik penahanan tersebut. Perbedaan ini menjadi dasar pentingnya penelitian ini dilakukan, yakni untuk memahami bagaimana masing-masing media membentuk bingkai narasi atas satu peristiwa yang sama, serta bagaimana *framing* tersebut memengaruhi cara publik memaknainya.

Penelitian ini bertujuan untuk mengungkap bagaimana Detik.com dan Tempo.co membingkai berita mengenai penahanan Hasto Kristiyanto pada Februari 2025. Dalam menganalisisnya, digunakan model *framing* yang dikembangkan oleh Robert N. Entman, yang mencakup empat aspek utama: pendefinisian masalah, identifikasi penyebab, penilaian moral, dan rekomendasi penyelesaian. Rentang waktu Februari 2025 dipilih karena menjadi momen penting saat penahanan berlangsung dan mencuri perhatian media nasional secara masif.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini merumuskan pertanyaan utama bagaimana konstruksi *framing* pemberitaan yang dilakukan Detik.com dan Tempo.co terhadap penahanan Hasto Kristiyanto oleh KPK? Dengan menjawab pertanyaan tersebut, penelitian ini tidak hanya berkontribusi secara akademik dengan menambah referensi dalam kajian komunikasi dan media, khususnya dalam analisis

framing, tetapi juga memberikan manfaat praktis bagi kalangan akademisi, jurnalis, dan masyarakat luas yang ingin memahami bagaimana media membentuk realitas sosial melalui pemberitaan. Temuan dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi pijakan bagi studi lanjutan yang menyoroti praktik *framing* media di Indonesia dalam konteks isu-isu hukum dan politik.

II. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menerapkan pendekatan kualitatif dalam kerangka paradigma konstruktivisme, yang meyakini bahwa realitas sosial terbentuk melalui interpretasi subjektif individu atas suatu peristiwa (Morissan dalam Hariyani Etik et al., 2024). Fokus pendekatan ini terletak pada penggalian makna dari perspektif individu yang mengalami langsung fenomena yang dikaji. Moleong (dalam Fairus, 2020) menjelaskan bahwa pendekatan kualitatif bertujuan memahami pengalaman manusia secara komprehensif, meliputi persepsi, motivasi, tindakan, dan perilaku, yang dipaparkan secara deskriptif sesuai konteks alamiah objek yang diteliti.

Dalam penelitian ini, analisis *framing* model Robert N. Entman digunakan untuk mengungkap bagaimana media membingkai suatu peristiwa sebagai representasi realitas sosial. Metode ini juga berguna dalam menelaah bagaimana khalayak menafsirkan suatu isu melalui cara media menyampaikan informasi. Sambo (dalam Insani Devan Fairuz & Zamzamy Ahmad, 2023) menyebutkan bahwa analisis *framing* sering digunakan untuk mengkaji representasi media terhadap kelompok atau isu tertentu serta dampak sosial yang muncul dari proses pbingkaiian tersebut. Penelitian ini secara khusus mengkaji bagaimana Detik.com dan Tempo.co mengonstruksi narasi pemberitaan mengenai penahanan Hasto Kristiyanto oleh KPK.

Secara konseptual, penelitian ini berangkat dari tiga definisi utama. Pertama, berita dipahami sebagai informasi aktual, faktual, dan relevan yang disampaikan kepada publik dalam bentuk fakta, opini, atau ide. Dalam konteks ini, berita merujuk pada laporan Detik.com dan Tempo.co mengenai penahanan Hasto. Kedua, media online adalah platform berbasis internet yang mendistribusikan informasi secara cepat dan luas, seperti yang dilakukan oleh kedua media tersebut. Ketiga, penahanan Hasto dimaknai sebagai tindakan hukum yang dilakukan KPK atas dugaan keterlibatannya dalam kasus suap,

sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Data dalam penelitian ini diperoleh dari pemberitaan di Detik.com dan Tempo.co selama periode 20–26 Februari 2025, yang merupakan masa berlangsungnya penahanan Hasto dan meningkatnya intensitas pemberitaan. Dari total 63 berita yang dimuat Detik.com dan 17 berita dari Tempo.co, masing-masing enam berita dipilih secara purposif berdasarkan kesesuaian substansi, waktu kejadian, lokasi peristiwa, dan keberagaman narasumber.

Adapun subjek dalam penelitian ini adalah dua media daring tersebut, sementara objek penelitiannya adalah konten berita mengenai penahanan Hasto Kristiyanto. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui dokumentasi berita yang relevan dengan menggunakan kata kunci “Penahanan Hasto Kristiyanto” dan “Hasto Kristiyanto” melalui mesin pencarian internal masing-masing media. Selain itu, referensi sekunder berupa buku, jurnal, skripsi, dan sumber daring juga digunakan untuk memperkuat analisis dan mendukung kerangka teoritis yang digunakan.

Dalam tahap analisis data, peneliti menerapkan model *framing* Robert N. Entman yang terdiri dari empat elemen utama: define problems (pendefinisian masalah), diagnose causes (identifikasi penyebab), make moral judgment (pemberian penilaian moral), dan treatment recommendation (pemberian solusi atau rekomendasi tindakan). Peneliti menelaah bagaimana media mendefinisikan penahanan Hasto apakah sebagai persoalan hukum, politik, atau lainnya serta mengamati kecenderungan nada pemberitaan, apakah bernuansa positif atau negatif. Selanjutnya, analisis dilakukan untuk mengidentifikasi aktor yang dianggap bertanggungjawab atas peristiwa tersebut, mengevaluasi penilaian moral yang diberikan media terhadap pihak-pihak terkait, serta melihat solusi atau tanggapan yang ditawarkan dalam narasi pemberitaan.

Melalui model ini, penelitian bertujuan menelusuri bagaimana konstruksi naratif dalam media dibentuk dan bagaimana konstruksi tersebut memengaruhi persepsi publik terhadap kasus penahanan Hasto Kristiyanto oleh KPK.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Memperoleh pemahaman yang lebih utuh mengenai hasil temuan penelitian, bagian ini menguraikan bagaimana Detik.com membentuk narasi pemberitaan seputar penahanan Hasto Kristiyanto. Pendekatan analisis *framing* dari Robert N. Entman digunakan untuk menelusuri bagaimana media menyusun konstruksi informasi melalui pilihan narasi, sudut pandang yang digunakan, serta aspek-aspek yang disorot secara khusus dalam pemberitaan.

Penelitian ini menelaah enam berita yang diterbitkan Detik.com selama Februari 2025, yang secara spesifik membahas penahanan Hasto oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Proses analisis dilakukan dengan memanfaatkan empat dimensi *framing* ala Entman, yaitu: bagaimana isu didefinisikan, siapa yang dianggap sebagai penyebab, bagaimana penilaian moral diberikan, dan solusi seperti apa yang disarankan dalam wacana pemberitaan. Pemilihan berita dilakukan secara purposif dengan mempertimbangkan kesamaan tema, waktu kejadian, konteks peristiwa, dan keberagaman narasumber agar representasi pemberitaan dapat dianalisis secara menyeluruh.

Berita pertama yang berjudul “Penjelasan Lengkap KPK Saat Tahan Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto” menyajikan peristiwa penahanan sebagai bagian dari proses hukum yang dijalankan KPK. Dalam berita ini, Hasto disebut terlibat dalam penghilangan barang bukti dan upaya mempengaruhi saksi. Narasi tersebut membentuk persepsi bahwa tindakan Hasto merupakan pelanggaran serius terhadap hukum, yang dijawab KPK dengan langkah penahanan selama 20 hari demi kelancaran penyidikan.

Pada berita kedua, “Eks Penyidik: Bukti KPK Tak Pandang Bulu dengan Tahan Sekjen PDIP Hasto”, Detik.com menghadirkan opini dari mantan penyidik KPK, Yudi Purnomo, yang menegaskan bahwa langkah KPK membuktikan netralitas dan keberanian institusi dalam menindak siapa pun yang melanggar hukum, terlepas dari latar belakang politiknya. Bahkan, ia mengaitkan tindakan KPK ini dengan agenda pembaruan hukum di era pemerintahan Presiden Prabowo, serta mengajak publik mendukung langkah KPK.

Berita ketiga yang berjudul “Ketua KPK Tegaskan Tak Ada Politisasi Kasus Sekjen PDIP Hasto” menampilkan pernyataan Ketua KPK, Setyo Budiyo, yang menampik tuduhan adanya kepentingan politik dalam proses penahanan. Ia menilai bahwa Hasto bersikap kooperatif karena hadir dalam proses

pemeriksaan meski sebelumnya sempat mengajukan upaya praperadilan.

Selanjutnya, berita keempat, “Pakar: Penahanan Hasto Harus Dihormati, Upaya Penegakan Hukum”, mengangkat pandangan akademisi Fatkhul Muin dari Untirta. Ia menekankan bahwa proses hukum terhadap Hasto sudah sesuai prosedur karena dilandasi bukti yang cukup. Ia juga mengingatkan pentingnya menghormati proses peradilan sebagai bagian dari upaya penegakan hukum yang sah dan konstitusional.

Berita kelima, “Ketua KPK soal Penangguhan Penahanan Hasto: Kewenangan Penyidik”, membahas permohonan penangguhan penahanan dari tim kuasa hukum Hasto. Dalam berita ini, Detik.com tetap konsisten menampilkan sudut pandang prosedural, menyatakan bahwa meskipun pengajuan penangguhan adalah hak tersangka, keputusan tetap berada di tangan penyidik. Narasi ini tidak menunjukkan keberpihakan, melainkan menekankan prosedur dan aturan hukum yang berlaku.

Berita keenam berjudul “MAKI: Justru Aneh Bila KPK Tangguhkan Penahanan Hasto” menampilkan tanggapan keras dari dua lembaga antikorupsi, yakni Masyarakat Anti-Korupsi Indonesia (MAKI) dan Indonesia Corruption Watch (ICW). Kedua lembaga tersebut menolak wacana penangguhan penahanan dan juga mendorong KPK agar segera melimpahkan perkara ke pengadilan. *Framing* moral dalam berita ini menempatkan tindakan korupsi sebagai kejahatan luar biasa yang memerlukan penindakan tegas dan tanpa kompromi.

Dari keenam berita tersebut, terlihat pola *framing* Detik.com yang konsisten dalam memperkuat posisi KPK sebagai lembaga penegak hukum yang sah, independen, dan kredibel. Narasumber yang digunakan mulai dari pejabat negara, akademisi, hingga aktivis antikorupsi cenderung memperkuat narasi bahwa penahanan Hasto adalah bagian dari sistem hukum yang dijalankan secara profesional dan patut dihormati. Selain itu, kecenderungan *framing* yang mendukung langkah KPK juga selaras dengan agenda pemerintah dalam memperkuat supremasi hukum dan memberantas korupsi secara menyeluruh. Dengan menampilkan narasi yang menegaskan profesionalitas lembaga negara serta keberanian institusi penegak hukum dalam bertindak tanpa pandang bulu, Detik.com secara tidak langsung ikut memperkuat legitimasi pemerintahan saat ini sebagai aktor yang mendukung penegakan hukum yang bersih dan berintegritas.

Sebagai bahan perbandingan, Tempo.co menunjukkan pola *framing* yang cenderung lebih kritis terhadap proses penahanan Hasto Kristiyanto. Analisis dilakukan terhadap enam berita yang terbit antara tanggal 20 hingga 26 Februari 2025, menggunakan pendekatan *framing* dari Robert N. Entman yang mencakup empat aspek: definisi masalah, identifikasi penyebab, penilaian moral, dan solusi yang ditawarkan.

Berita pertama yang berjudul “PDIP Nilai Penahanan Hasto Tak Hormati Proses Praperadilan” memuat kritik dari PDIP yang menilai bahwa penahanan tersebut mengabaikan mekanisme hukum praperadilan dan mengandung kepentingan politik. Sementara itu, berita kedua “PDIP Duga Penahanan Hasto Pesanan Pihak di Luar KPK” menyoroti dugaan adanya intervensi eksternal terhadap proses hukum, meskipun KPK telah membantahnya. Fokus pemberitaan tetap tertuju pada persoalan netralitas lembaga.

Berita ketiga, “Hasto Ditahan, Kuasa Hukum Sesalkan Penyidik KPK Tak Konfirmasi Soal Bukti Permulaan”, mengangkat keberatan dari tim hukum Hasto yang mempertanyakan dasar hukum penahanan, serta menilai langkah tersebut tergesa-gesa dan tidak proporsional. Selanjutnya, berita keempat “Penasihat Hukum: Kasus Hasto Direspons Berlebihan, Seperti Kasus Terorisme” memuat perbandingan antara penanganan kasus Hasto dan penanganan kasus terorisme, serta menyarankan agar KPK menunggu hasil praperadilan sebelum mengambil tindakan.

Berita kelima “Narasi Politisasi Hukum Penahanan Hasto Kristiyanto” menampilkan sudut pandang yang seimbang antara klaim politisasi yang dilontarkan PDIP dan tanggapan dari KPK yang menekankan aspek pembuktian hukum. Tempo.co menyuguhkan isu ini sebagai dinamika antara kepentingan politik dan proses hukum. Sedangkan berita keenam “Rentetan Sikap PDIP Usai Hasto Kristiyanto Ditahan KPK” menggambarkan reaksi PDIP secara menyeluruh, yang menilai penahanan ini sebagai bentuk tekanan politik dan intervensi, serta mengaitkan sikap partai dengan arahan Ketua Umum.

Secara umum, *framing* yang dibangun oleh Tempo.co memperlihatkan kecenderungan kritis terhadap langkah KPK. Media ini banyak menyoroti dugaan pelanggaran prosedur, kemungkinan intervensi politik, serta dampak yang ditimbulkan terhadap stabilitas internal PDIP. Narasi yang diangkat memberikan ruang lebih besar bagi suara oposisi, dan

menyampaikan peristiwa penahanan dari perspektif yang lebih politis serta skeptis terhadap integritas lembaga penegak hukum.

IV. SIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Detik.com dan Tempo.co memiliki pendekatan *framing* yang berbeda dalam memberitakan penahanan Hasto Kristiyanto. Detik.com cenderung menekankan aspek *legal formal*, mendukung narasi penegakan hukum KPK, dan lebih banyak mengutip sumber dari lembaga resmi untuk menguatkan legitimasi hukum. Sebaliknya, Tempo.co menampilkan pemberitaan yang lebih kritis dengan menyoroti kemungkinan intervensi politik dan menghadirkan sudut pandang alternatif. Narasi yang dibangun menekankan dinamika politik di balik kasus, dengan melibatkan narasumber dari kalangan partai dan akademisi.

Perbedaan *framing* ini mencerminkan pengaruh ideologi, kepemilikan, dan kebijakan redaksional media dalam membentuk isi pemberitaan. Media tidak hanya menyampaikan informasi, tetapi juga berperan dalam membentuk persepsi publik melalui pilihan narasi yang ditampilkan. Sebagai kontribusi, penelitian ini merekomendasikan: pertama, pentingnya peningkatan literasi media masyarakat agar lebih kritis dalam menyikapi isu hukum dan politik; kedua, media perlu menjaga independensi serta menyajikan berita yang berimbang dan berbasis fakta; ketiga, peneliti selanjutnya disarankan memperluas objek dan menggunakan pendekatan analisis lain untuk memperkaya kajian *framing* media dan keempat, hasil penelitian ini dapat menjadi rujukan akademis dalam pengembangan studi komunikasi politik di Indonesia.

B. Saran

Pembahasan terkait penelitian ini masih sangat terbatas dan membutuhkan banyak masukan, saran untuk penulis selanjutnya adalah mengkaji lebih dalam dan secara komprehensif tentang

DAFTAR RUJUKAN

- Alamsyah. (2021). KOMUNIKASI POLITIK DAN MEDIA MASSA. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Anindito, L. (2025, 24 Februari). Narasi Politisasi Hukum Penahanan Hasto Kristiyanto.

TEMPO.CO.

<https://www.tempo.co/politik/politisasi-hukum-penahanan-hasto-kristiyanto-1211181>

- APJII. (2024). LAPORAN SURVEI INTERNET APJII TAHUN 2024. Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia. <https://apjii.or.id>
- Berger, P. L., & Luckmann, T. (1966). THE SOCIAL CONSTRUCTION OF REALITY: A TREATISE IN THE SOCIOLOGY OF KNOWLEDGE. New York: Anchor Books.
- Bungin, B. (2008). SOSIOLOGI KOMUNIKASI: TEORI, PARADIGMA, DAN DISKURSUS TEKNOLOGI KOMUNIKASI DI MASYARAKAT. Jakarta: Kencana.
- Dendi, A., & Cutra, A. (2022). Analisis Framing Media Online dalam Pemberitaan Konflik Agraria. JURNAL ILMU KOMUNIKASI, 14(2), 45-57.
- Eriyanto. (2002). ANALISIS FRAMING: KONSTRUKSI, IDEOLOGI, DAN POLITIK MEDIA. Yogyakarta: LKiS.
- Fairus, I. D. (2020). PENDEKATAN KUALITATIF DALAM PENELITIAN KOMUNIKASI. Bandung: Simbiosis Rekatama Media.
- Habibie, D. K. (2018). Media Massa dan Pembentukan Opini Publik: Kajian atas Peran Jurnalisme. JURNAL KOMUNIKASI, 6(1), 89-103.
- Hariyani, E., et al. (2024). Metodologi Penelitian Komunikasi. JURNAL PENELITIAN KOMUNIKASI, 13(1), 22-37.
- Meilina, A. P. (2022). Framing Media dalam Isu Politik: Studi Kasus Media Online Indonesia. JURNAL ILMU SOSIAL DAN POLITIK, 9(2), 101-117.
- Tempo.co. (2025a, 20 Februari). PDIP Nilai Penahanan Hasto Tak Hormati Proses Praperadilan. TEMPO.CO. <https://www.tempo.co/politik/pdip-nilai-penahanan-hasto-tak-hormati-proses-praperadilan-1210019>
- Tempo.co. (2025b, 21 Februari). PDIP Duga Penahanan Hasto Pesanan Pihak di Luar KPK. TEMPO.CO. <https://www.tempo.co/politik/pdip-duga-penahanan-hasto-pesanan-pihak-di-luar-kpk-1210061>

- Tempo.co. (2025c, 21 Februari). Hasto Ditahan, Kuasa Hukum Sesalkan Penyidik KPK Tak Konfirmasi Soal Bukti Permulaan. TEMPO.CO.
<https://www.tempo.co/politik/hasto-ditahan-kuasa-hukum-sesalkan-penyidik-kpk-tak-konfirmasi-soal-bukti-permulaan-1210082>
- Tempo.co. (2025d, 21 Februari). Penasihat Hukum: Kasus Hasto Direspons Berlebihan, Seperti Kasus Terorisme. TEMPO.CO.
<https://www.tempo.co/politik/penasihat-hukum-kasus-hasto-direspons-berlebihan-seperti-kasus-terorisme-1210071>
- Tempo.co. (2025e, 23 Februari). Rentetan Sikap PDIP Usai Hasto Kristiyanto Ditahan KPK. TEMPO.CO.
<https://www.tempo.co/politik/rentetan-sikap-pdip-usai-hasto-kristiyanto-ditahan-kpk-1211102>
- Wibawa, D. (2020). Media, Kekuasaan, dan Representasi. JURNAL KAJIAN KOMUNIKASI, 8(1), 11–28.